

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin bertumbuh dan berkembangnya dunia dalam berbagai aspek kehidupan, telah merubah banyak tatanan yang ada di masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang terjadi di dunia ini terjadi karena beberapa factor yang akhirnya akan melibatkan pasrtisipasi dalam masyarakat demi kemajuan suatu perekonomian di suatu negara. Setelah adanya pandemic Covid-19 yang sangat merubah tatanan kehidupan masyarakat dalam bidang perekonomian ini tentunya akan memunculkan pembangunan baru yang digerakkan oleh masyarakat untuk menopang Kembali kehidupannya yaitu dengan melalui pemberdayaan masyarakat (Puspaningtyas & Suprayitno, 2021).

Pemberdayaan masyarakat harus digencarkan sebagai bentuk respons terhadap permasalahan yang terjadi karena adanya Covid-19 untuk meningkatkan kembali keuntungan dari penjualan akibat adanya pandemic Covid-19 yang mana pelaku UMKM menjadi peran yang penting dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Andayani et al., 2021). Pemberdayaan ekonomi melibatkan upaya untuk memfasilitasi pelatihan dan reorientasi karier, memberikan akses ke modal usaha, dan mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil. Dalam beberapa dekade terakhir, pemberdayaan masyarakat telah menjadi topik yang semakin penting dan menonjol di berbagai tingkatan, dari tingkat lokal hingga internasional. Hal ini dipicu oleh pemahaman

bahwa masyarakat yang kuat dan berdaya adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui program-program unggulan yang pro terhadap masyarakat ini merupakan alternatif dalam penurunan tingkat kemiskinan (E. Putra et al., 2020). Salah satu Program unggulan yang dirancang sebagai bentuk untuk mengentaskan kemiskinan di salah satu Kota yang ada di Provinsi Yogyakarta yaitu Program Gandeng Gendong. Program pemberdayaan Gandeng Gendong ini merupakan program meningkatkan ekonomi pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk memajukan lingkungan dengan memanfaatkan potensi yang dilakukan dengan cara pengembangan bersama melalui stakeholder yang sudah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta Tahun 2018 (E. Putra et al., 2020).

Gagasan awal dari adanya program Gandeng Gendong yang melibatkan 5K yang mana didalamnya terdiri dari elemen dari Pemerintah, Korporasi, Kampus, Kampung dan Komunitas ini berfokus pada pemanfaatan potensi local daerah (E. Putra et al., 2020). Gandeng Gendong merupakan tindakan konkret smart city pada dimensi smart society karena ditujukan untuk mengoptimalkan potensi lokal yang membawa Pemerintah Kota Yogyakarta bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder (Nadialista Kurniawan, 2021). Program Gandeng Gendong merupakan sebuah program yang digagas oleh pemerintah kota Yogyakarta sebagai bentuk pemanfaatan

potensi lokal yang lebih berfokus pada produk kuliner, kerajinan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 Program Gandeng Gendong mempunyai Visi yaitu “Bersama Bersatu memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.” Selain itu Misi dalam Program Gandeng Gendong yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 berbunyi:

1. Menanamkan nilai-nilai etika dan budaya gotong royong;
2. Meningkatkan partisipasi semua stakeholder pembangunan dalam kegiatan pembangunan dalam kegiatan pembangunan, khususnya pada pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
3. Adanya keterpaduan langkah dalam memberdayakan masyarakat, kampung atau kawasan; dan
4. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kampung di Kota Yogyakarta.

Dasar hukum dalam penyusunan Program Gandeng Gendong adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah 2017-2022;
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 116 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Gandeng Gendong mempunyai konsep yang saling bergandengan serta saling membantu dalam hal menopang kemajuan masyarakat dalam bidang ekonomi. Angka kemiskinan yang semakin hari semakin meningkat ini tentunya membuat banyak masyarakat merasa kekurangan dalam hal memenuhi kehidupan hidupnya. Untuk itu program gandeng gendong dibentuk sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di kota Yogyakarta yang melibatkan kolaborasi antara 5K. Dengan adanya program Gandeng Gendong ini akan membuat kehidupan masyarakat Yogyakarta mengalami perubahan yang baik dalam bidang ekonomi (Iza & Nurhaeni, 2021).

Program Gandeng Gendong ini merupakan program yang inovatif dalam upaya pengentaskan kemiskinan. Selain itu, program Gandeng Gendong ini dibentuk sebagai bentuk peningkatan kapasitas UMKM dalam keterampilan manajerial, pemasaran dan operasional. Hal ini tentunya akan membuat dasar yang lebih kokoh dalam pertumbuhan bisnis dan kemampuan UMKM dalam menghadapi tantangan besar.

Program Gandeng Gendong ini diadakan tentunya sebagai bentuk utama pengentasan kemiskinan di kalangan pelaku ekonomi mikro yang akan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Secara filosofis Gandeng Gendong tidak hanya dimaknai sebagai sebuah gerakan masyarakat semata, namun lebih dari itu, yaitu sebagai simbolisasi kerukunan masyarakat. Keistimewaan Yogyakarta bukan semata-mata karena nilai historis dan proses politik pengangkatan Gubernur DIY melalui penetapan, namun juga karena nilai budaya dalam masyarakatnya, termasuk tatanan kehidupan masyarakat yang berjiwa gotong-royong. Kata “Gandeng” bermakna sebagai semua elemen dalam masyarakat saling bergandengan tangan dengan niat untuk saling membantu semua pihak untuk maju bersama. Sedangkan “Gendong” mempunyai makna sebagai masyarakat yang membantu warga lain untuk berjalan atau dalam arti lain masyarakat yang lemah digendong dan ditarik agar bisa berjalan bersama (Yelvita, 2022).

Program Gandeng Gendong yang tengah digaungkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan gerakan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang makin sejahtera dengan bersinerginya elemen Korporasi, Kampus, Kampung, Komunitas dan Kota. Pihak-pihak yang terdiri dari 5K tersebut harus memiliki komitmen tentang konsep Gandeng Gendong yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama serta diperlukan berbagai pemahaman (*share understanding*) antara lain dengan proses *hearing* antar-pihak yang berkepentingan sehingga pelaksanaan program Gandeng Gendong akan berjalan secara efektif dan efisien (Widiarti Lestariningsih et al., 2023). Terlebih lagi melihat perkembangan teknologi sekarang ini

maka di semua sektor kehidupan dimana semakin besar tantangan yang akan dihadapi maka konsep Gandeng Gendong menjadi sangat penting untuk saling bertukar pengetahuan-pengetahuan baru, informasi, pemenuhan barang dan jasa serta segala kebutuhan masyarakat. Prinsip Program Gandeng Gendong telah menggunakan metode jalan tengah yaitu keseimbangan antara sentralisasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan gotong royong dari masyarakat Kota Yogyakarta.

Keberadaan Program Gandeng Gendong merupakan hal yang vital karena akan berdampak pada kemajuan perekonomian dalam masyarakat karena menjadi program yang inovatif bagi kehidupan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan (Iza & Nurhaeni, 2021). Dengan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini tentunya menjadi sebuah penguat pemerintah dalam melakukan transformasi otonomi daerah bersama dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam merancang suatu program untuk memajukan perekonomian masyarakat (Wulandari, D, Apiliyani, D, & Handayani, 2022).

Tabel 1. 1 Grafik kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Variabel Kemiskinan	Kemiskinan Kota Yogyakarta				
	2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	29.68	34.07	31.62	29.45	29.75
Persentase Penduduk Miskin	6.62	7.64	7.27	6.84	6.98
Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1)	0.80	1.07	1.19	0.85	1.38
Indeks Keparahan Kemiskinan(P2)	0.13	0.21	0.28	0.20	0.34
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	601 905	556 674	533 423	495 562	467 061

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018-2022 dapat diketahui jika angka kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta masih tergolong tinggi yang mana dapat dilihat bahwa tahun 2021 merupakan tahun yang menempati angka kemiskinan tertinggi yaitu mencapai 34.07 (dalam 000). Selanjutnya pada tahun 2019 angka kemiskinan di Kota Yogyakarta terlihat kecil dalam grafik 5 tahun terakhir yaitu 29.45 (dalam 000). Namun, dalam hal indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan berdasarkan data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa presentase yang ada tidak terlalu tinggi yang mana dalam indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 1,38, pada tahun 2019 menurun sebesar 0,85, pada tahun 2020 menurun sebesar 0,28, pada tahun 2021 menurun menjadi 0,21 dan pada tahun 2022 menurun sebesar 0,13.

Selanjutnya dalam hal indeks keparahan kemiskinan juga tidak jauh berbeda dari indeks kedalaman kemiskinannya, yang mana pada tahun 2018 sebesar 0,34%, pada tahun 2019 menurun menjadi 0,20%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,28%, pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 0,21% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 0,13%. Dengan melihat jumlah yang semakin menurun secara signifikan setiap tahunnya akan membuat masyarakat miskin yang ada di Kota Yogyakarta memperbaiki kehidupannya sehingga diprediksi dapat mengangkat masyarakat miskin untuk mendapatkan hidup dan layak. Hal ini tentunya perlu mendapat berbagai dukungan dari berbagai sector demi kesejahteraan masyarakat.

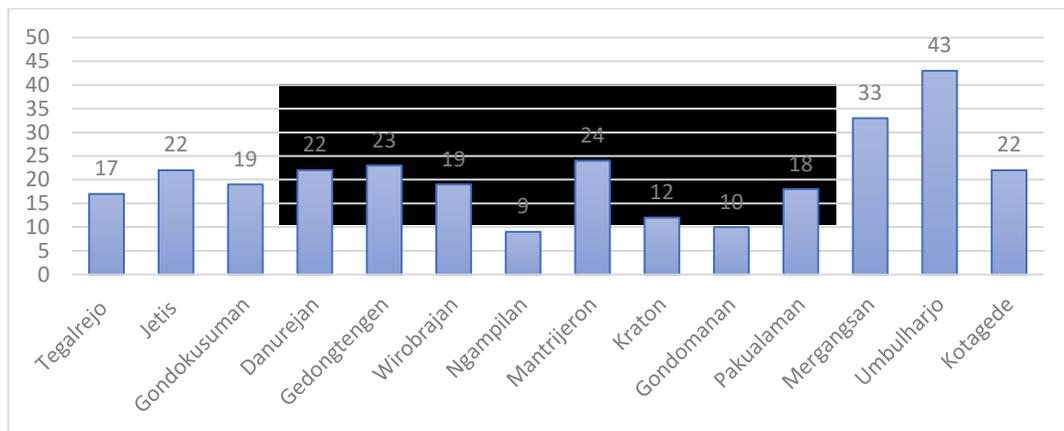
Meskipun demikian masih perlu perbaikan pada Program Gandeng Gendong, yaitu permasalahan kesadaran/mindset masyarakat yang masih kurang dalam

memahami program ini dan permasalahan keberlanjutan dalam menindaklanjuti hasil program tersebut di masyarakat. Kebijakan Gandeng Gendong adalah kebijakan pro rakyat dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang harus disukseskan bersama. Kebijakan Gandeng Gendong adalah suatu kebijakan yang mengimplementasikan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu tujuan Gandeng Gendong adalah bagaimana UMKM di wilayah dapat menikmati APBD dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, kampus, kampung, komunitas dan corporate atau perusahaan baik swasta maupun BUMD.

Program Gandeng Gendong UMKM di Kota Yogyakarta memiliki kepentingan yang khusus untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. UMKM yang dikelola dengan baik dapat menjadi motor ekonomi yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM, program ini turut berkontribusi pada stabilitas ekonomi Kota Yogyakarta. Salah satu aplikasi yang berperan besar dalam proses pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta adalah Nglarisi. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mensukseskan untuk Gerakan Gandeng Gendong menciptakan sebuah aplikasi pemasaran bernama “Nglarisi” Aplikasi ini diluncurkan pada tanggal 27 Juni 2019. Aplikasi Nglarisi adalah aplikasi belanja jamuan makan minum rapat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dimanfaatkan oleh penyedia Gandeng Gendong, yaitu komunitas UMKM yang bergerak dibidang kuliner di Kota Yogyakarta. Potensi alokasi anggaran jamuan makan minum APBD dimanfaatkan sebagai daya dorong pemasaran produk oleh kelompok UMKM kuliner. Diharapkan aplikasi ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk

memberdayakan masyarakat yang masuk dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Saat ini telah ada 269 daftar UMKM dari 14 Kemantren yang ada di Kota Yogyakarta dan telah masuk dalam program Gandeng Gendong serta telah terintegrasi pada platform JSS (Jogja Smart Service).

Gambar 1.1 Grafik Daftar UMKM Kota Yogyakarta



Sumber: DRP (Daftar Registrasi Penyedia), Setda Kota Yogyakarta

Berdasarkan grafik di atas jumlah UMKM yang sudah terdaftar dalam Program Nglarisi Gandeng Gendong Kota Yogyakarta sebanyak 293 yang tersebar di 14 Kemantren di Kota Yogyakarta. Dapat dilihat Kemantren Umbulharjo merupakan kemantren dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu 43 UMKM. Selanjutnya Kemantren Mergangsan sebanyak 33 UMKM, Kemantren Mantrijeron 24 UMKM, Kemantren Jetis, Kemantren Danurejan dan Kemantren Kotagede sebesar 22 UMKM. Selanjutnya Kemantren Gondokusuman dan Kemantren Wirobrajan sebanyak 19 UMKM, Kemantren Pakualaman sebanyak 18 UMKM, Kemantren Tegalrejo sebanyak 17

UMKM, Kemantren Kraton sebanyak 12 UMKM, Kemantren Gondomanan sebanyak 10 UMKM, dan yang terakhir Kemantren Ngampilan sebanyak 9 UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu inisiatif yang menarik perhatian dalam mendukung keberlanjutan UMKM adalah Program Gandeng-gendong. Program ini mengusung konsep kolaboratif, di mana berbagai pihak bekerja sama untuk memberikan dukungan kepada UMKM dalam berbagai aspek, mulai dari pengembangan produk, akses pasar, hingga permodalan. Program Gandeng Gendong menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat ekosistem UMKM di Kota Yogyakarta. Penting untuk diakui bahwa keberlanjutan UMKM bukanlah pencapaian yang dapat dicapai oleh satu pihak saja. Ini adalah upaya bersama yang memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam suatu ekosistem ekonomi yang bisa disebut dengan 5K. Kolaborasi tersebut mencakup berbagai unsur, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, industri, masyarakat, dan media.

Oleh Karena itu, bagaimana bentuk kolaborasi Penta Helix dalam Penerapan Program Gandeng Gendong Sebagai Wujud Keberlanjutan UMKM di Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, masyarakat, dan media dalam penerapan Program Gandeng Gendong berkontribusi pada keberlanjutan UMKM di Kota Yogyakarta dalam hal untuk meningkatkan pertumbuhan, inovasi, dan daya saing

UMKM di Kota Yogyakarta serta mengukur kinerja ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari program Gandeng Gendong.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, masyarakat, dan media dapat mendukung keberlanjutan UMKM. Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bisa digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung UMKM, penelitian ini dapat membantu masyarakat menjadi lebih aktif dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal. Ini dapat membawa manfaat sosial yang lebih besar kepada masyarakat setempat. Hal ini akan membantu mengidentifikasi solusi yang lebih efektif untuk memperkuat dan memajukan sektor UMKM di Kota Yogyakarta.

Dengan adanya program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta ini tentunya memberikan manfaat bagi lima actor yang tergabung dalam hal ini yang mana terdiri dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas dan media. Manfaat pertama yang didapatkan oleh pemerintah yaitu dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak yang ada di daerah kota Yogyakarta dan tentunya

akan menaikkan jumlah pendapatan di Kota Yogyakarta. Selanjutnya manfaat juga dapat didapatkan oleh pihak akademisi, yang mana akademisi dapat menjadikan hal ini menjadi subjek penelitian yang menarik dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, manajemen, pemasaran dan sebagainya. Selain itu akademisi juga dapat menjadikan program ini sebagai bentuk pengembangan kurikulum, pelatihan dan riset pada tingkat perguruan tinggi untuk mewujudkan generasi muda yang terampil dalam dunia bisnis.

Dalam bidang industri, program Gandeng Gendong juga akan berdampak baik karena akan mendatangkan peluang kemitraan antara industry dengan UMKM. Proses kolaborasi ini juga akan berdampak baik pada pengembangan bisnis yang terjadi. Manfaat yang akan didapat oleh pihak komunitas dengan adanya program Gandeng Gendong ini salah satunya terjadinya penguatan jaringan komunitas yang mana dilakukannya kerjasama antara UMKM, pemerintah, dan industri logistik, program ini menciptakan ikatan yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Campur tangan dari pihak media dalam keberhasilan program Gandeng Gendong merupakan hal yang sangat penting, terlebih dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat hampir seluruh manusia menggunakan sosial media. Dengan memberikan liputan yang komprehensif dan berimbang tentang program UMKM gandeng sending, media dapat memperkuat reputasi mereka sebagai sumber berita yang tepercaya dan berkomitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Keberhasilan program UMKM Gandeng

Gendong dapat menarik minat perusahaan-perusahaan untuk beriklan atau mensponsori acara-acara media yang terkait dengan liputan tentang UMKM. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan media dan membantu mereka tetap beroperasi secara berkelanjutan.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1	(Andiny, 2018)	<p>Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah ditemukan bukti bahwa Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Langsa. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai bantuan dari pemerintah yang telah disalurkan kepada para pelaku UMKM dalam bentuk modal, mesin, gerobak jualan dan bentuk bantuan lainnya sehingga dapat mengurangi pengeluaran dari pelaku usaha dan biaya produksi. Program tersebut juga</p>

			berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan.
2	(MPOC et al., 2020)	Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo	Hasil penelitian ini menunjukkan tentang adanya kekurangan dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 16 Poin C yang mana berisi tentang kebijakan tentang pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan UMKM “1000 Wirausaha Baru” karena masih terdapat indicator dari kebijakan (content policy) yang belum terlaksana dengan baik.

3			<p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa adanya percobaan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam menanggulangi tingkatan kemiskinan dan pengangguran yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Asahan dari berbagai program seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), pemberdayaan UMKM dan lainnya.</p>
4	(Sulastri & Dilastri, 2015)	<p>Peran Pemerintah dan Akademisi Dalam Memajukan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang ada di daerah tersebut sudah turun temurun yang mempunyai pola dan desain yang khas.</p>

		Industri Kreatif Kasus Pada UKM Kerajinan Sulaman di Kota Pariaman	Namun persoalan yang timbul adalah jumlah usaha dari tahun ke tahun mengalami penurunan dengan banyak alasan dan permasalahan yang ada. Pemerintah telah berperan banyak untuk pengrajin dan pengusaha, namun keinginan pengrajin dan pengusaha berbeda karena mereka sulit untuk merubah diri dan berkembang.
5	(Hanifah et al., 2023)	Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus pada UMKM Makanan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang telah mampu memberikan kontribusi terkait UMKM bagi daerah dengan membuka lapangan pekerjaan serta dapat menarik investor dari luar untuk menanamkan

		Olahan Ubi Cilembu di Kabupaten Sumedang)	modalnya. Namun upaya yang diberikan oleh pemerintah masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran serta sulitnya regulasi terkait UMKM yang mana menciptakan kondisi overlapping.
6	(Wahyuni, 2023)	Peran Pemerintah Desa Dalam Memotivasi UMKM di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, namun belum semuanya berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan peran tersebut bersifat umum.
7	(Kartika Sari et al., 2023)	Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa, Kota Bekasi mempunyai keunggulan dalam pengembangan

		Pengembangan UMKM Makanan Minuman Pada Era Digital	UMKM dalam sector makanan dan minuman karena berada dalam kuadran IV dengan strategi Grow and Build.
8	(Prastika, 2017)	Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Mennagah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Magetan sudah baik, karena pemerintah telah menjalankan perannya sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 yaitu pemerintah sebagai Fasilitator bagi masyarakat, pemerintah sebagai regulator serta peran pemerintah sebagai katalisator bagi masyarakat.
9	(T. G. Putra, 2015)	Peran Pemerintah Daerah dan	Pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah berperan sebagai

		Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang	fasilitator dan katalisator dalam manajemen usaha dan proses produksi, bantuan sarana dan prasarana berupa pemberian alat-alat pengembangan UMKM. Selain itu, partisipasi dari pelaku usaha dalam pengembangan UMKM adalah sebagai coordinator dalam kegiatan penelitian proses produksi, secara swadaya serta dalam pelatihan manajemen usaha.
10	(Prog et al., 2014)	Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis	Hasil penelitian menghasilkan adanya pembiayaan dari BPRS ini sangat membantu produksi usaha UMKM, karena akan meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

		Pedesaan di Sumatera Barat	
11	(Kota et al., 2013)	Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor yang mendorong pengusaha UMKM mengambil KUR di BRI karena banyak mendapatkan saran dari anggota keluarga atau teman. Selain itu tentunya menunjukkan bahwa faktor utama pendorong pengusaha UMKM mengambil KUR di BRI adalah suku bunga kredit lebih rendah.
12	(Name et al., 2022)	Meningkatkan Kinerja UMKM Industri Kreatif Melalui Pengembangan Kewirausahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan inovasi produk, system kinerja dan system pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha masih banyak

		<p>dan Orientasi Pasar: Kajian Pada Peran Serta Wirausaha Wanita Di Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY</p>	<p>mendapatkan kendala yang disebabkan karena sumber daya manusia yang ada kurang memiliki pemahaman yang baik dalam bidang bisnis atau tata kelola usaha. Selain itu inovasi dalam system pemasaran juga masih bersifat konvensional yang artinya pelaku usaha belum dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam pemasaran produknya.</p>
13	(Tjhin et al., 2021)	<p>Strategi Branding: Peran Media Sosial dalam Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Melalui UKM</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kantor Kelurahan Malaka Sari, Buaran mendapatkan respon yang sangat positif karena para pengusaha di UKM Malaka Sari tekah</p>

			mampu memahami dan mempunyai wawasan yang luas dalam memberdayakan teknologi digital secara maksimal dalam usaha yang sedang mereka kembangkan.
14	(Arumsari et al., 2022)	Peran Digital Marketing dalam Upaya Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Kelurahan Plamongsari Semarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang berada di Kelurahan Plamongsari masih memerlukan pengembangan dalam usaha dengan menggunakan teknologi, karena UMKM disitu masih menggunakan teknologi sederhana dalam hal pemasarannya yaitu hanya dengan menggunakan WA dan Facebook. Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dalam

			<p>memasarkan usahanya dengan bantuan pemasaran digital dengan menggunakan media sosial yang lebih baik seperti E-Commerce.</p>
15	(Indika & Marliza, 2019)	<p>Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan di Kecamatan Tugumulyo dilakukan melalui pengembangan yang dilakukan secara internal oleh pihak internal yang mana hal tersebut direalisasikan melalui pengadaan permodalan, inovasi hasil produk dan perluasan jaringan. Pihak pemerintah juga turut serta dalam hal pengadaan pelatihan dan pembinaan serta pemasaran produk dari Dinas Koperasi</p>

			dan UMKM Kabupaten Musi Rawas.
16	(Ibrahim, 2016)	Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa UKM di Kelurahan Jawa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun tetap ada kendalanya yaitu tidak proporsionalnya jumlah tenaga Pembina dengan jumlah UKM yang tersedia sehingga pemberdayaan yang terlaksana tidak maksimal.

Pada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan

umumnya mendapatkan campur tangan dari beberapa pihak yang mana peran pemerintah merupakan peran yang paling dominan. Pemerintah berperan sebagai pihak yang mengeluarkan pendanaan dari pusat yang kemudian diedarkan kepada masing-masing UMKM dengan melalui Dinas Perindustrian Koperasi Usaha kecil dan Menengah. Selain itu pengusaha (perusahaan) juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut di mana pengusaha menopang pembiayaan untuk masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Dalam penelitian sebelumnya pihak pengusaha yang berperan dalam proses pendanaan adalah Bank BRI melalui KUR (kredit Usaha Rakyat).

Pada penelitian terdahulu, banyak membahas tentang bagaimana peran pemerintah menetapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, mendukung inisiatif pelatihan yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi agar UMKM dapat bersaing secara efektif, dan memfasilitasi kehadiran UMKM dalam pameran dan acara bisnis untuk meningkatkan visibilitas mereka. Dengan melibatkan diri dalam berbagai aspek ini, pemerintah dapat berperan aktif dalam memberdayakan UMKM untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan tentang bagaimana bentuk kolaborasi Pentahelix di mana 5 aktor yang terdiri dari pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media Bersatu dalam proses pengembangan pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Yogyakarta,

yang mana Kota Yogyakarta merupakan kota pencetus program besar dari pemerintah yaitu program Gandeng Gendong.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Collaborative Governance

1.6.1.1 Definisi Kolaborasi

Secara epistemologi kolaborasi diangkat dari Bahasa Inggris yang berarti “co-labour” yang artinya bekerja sama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan pada saat industrialisasi mulai berkembang karena pada saat itu organisasi sudah semakin berkembang dengan kompleks (Arrozaaq, 2016). Kolaborasi menurut (Dorisman et al., 2021) adalah tindakan dari para pihak untuk menghasilkan keputusan bersama atas dasar “win-to-win”, sedangkan dalam perspektif Kerjasama dengan stakeholder merupakan konsep antar relasi antar organisasi, relasi antar pemerintah, analisis stratejik dan network multi organisasi. Menurut (Gunawan & Ma`ruf Farid, 2020) kolaborasi merupakan semua perbuatan yang mencakup kegiatan Kerjasama, saling berhubungan dan saling mengerti dari satu pihak ke pihak lain dan atau satu lembaga atau pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam suatu keputusan bersama.

(Choirul, 2020) berpendapat bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses saat beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya dan tanggung jawab atas segala program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan dan dievaluasi secara bersama yang berguna untuk mencapai hal yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut (Ihtiarni, 2023) kolaborasi

merupakan sebuah situasi adanya kerja sama antar dua orang atau lebih atau institusi yang mempunyai sebuah pemahaman untuk berusaha memecahkan permasalahan secara bersama serta bertanggungjawab untuk melaksanakan cita-cita dan tujuan yang telah disepakati bersama. Kolaborasi menurut (Ngambut, 2023) merupakan sebuah proses di mana para pihak yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan mereka dan mencari solusi yang melampaui visi mereka sendiri.

Kolaborasi menurut (Parjaman, 2017) merupakan bentuk keterkaitan di mana para actor yang terlibat berada dalam situasi di mana tidak terdapat hirarki dan terjadi pertukaran nilai serta transformasi pengetahuan dari peran mereka. Dalam hal ini unsur sharing, partnership dan independency menjadi hal yang penting dalam kolaborasi.

Terdapat 13 atribut yang melekat dalam konsep kolaborasi yang terdiri dari:

1. Upaya kooperatif dan intelektual
2. Pengetahuan dan keahlian dipandang lebih penting dari pada peran dan status
3. Kerjasama
4. Pentingnya teamwork
5. Muncul partisipasi dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan
6. Terjadinya hubungan non hirarkis
7. Adanya saling transformasi keahlian

8. Adanya keinginan untuk bekerjasama berdasarkan keputusan
9. Menjunjung tinggi rasa percaya dan saling menghormati
10. Diterapkannya prinsip kebersamaan sebagai mitra
11. Adanya ketergantungan satu sama lain
12. Terjalannya jaringan kerja yang kuat
13. Tidak terlalu mengandalkan asas resiprositas

Indicator kolaborasi menurut (Ndraha et al., 2022) terdiri dari tiga hal yaitu:

1. Saling ketergantungan positif yang artinya setiap anggota yang terlibat dalam sebuah kelompok berpegang pada tanggungjawab untuk mengerjakan Amanah yang menjadi bagiannya sendiri
2. Tanggungjawab individu artinya seluruh bagian dari anggota dalam kelompok memegang tanggungjawab untuk melakukan tugas bagiannya sendiri
3. Interaksi melalui tatap muka, artinya segala tugas yang ada harus dikerjakandengan cara interaktif dengan anggota yang lain dan berkoordinasi terkait segala bentuk penalaran, masukan dan kesimpulan tentang pekerjaan yang diberikan.

1.6.1.2 Definisi Governance

Menurut (Sumarno et al., 2009) governance merupakan serangkaian dari proses interaksi pada sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat untuk mengelola sumber daya public dan untuk menjamin realita hak asasi manusia. (Yuliar & Anggorowati,

2006) berpendapat bahwa Governance dapat didefinisikan sebagai “*systems of rule*” sebagai “kegiatan bertujuan dari suatu kolektivitas yang melangsungkan mekanisme yang dirancang untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, keharmonisan, kestabilan dan keberlanjutan.” Dalam hal ini governance mempunyai kebijakan dalam mengkombinasi antara agen-agen public dan swasta. (Arifin, 2017) berpendapat bahwa governance memiliki arti sebagai proses dimana secara kolektif memecahkan permasalahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat; dan government adalah instrument yang dipakai untuk itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa governance merupakan denyut nadi dari government itu.

(Dewi, 2019) berpendapat bahwa Governance merupakan proses pembuatan kebijakan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan negara (pemerintah), sector privat atau masyarakat madani dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakannya. Terdapat lima prosesi tentang governance yang terdiri dari:

1. Governance merujuk pada institusi dan actor
2. Governance mengidentifikasi adanya kaburnya batas-batas dan tanggungjawab mengatasi isu sosial dan isu ekonomi
3. Governance mengidentifikasikan adanya ketergantungan hubungan antara institusi yang terlibat
4. Governance adalah tentang self-governing otonom dari actor-aktor

5. Governance menyadarkan untuk memperbaiki sesuatu tidak perlu bergantung pada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya.

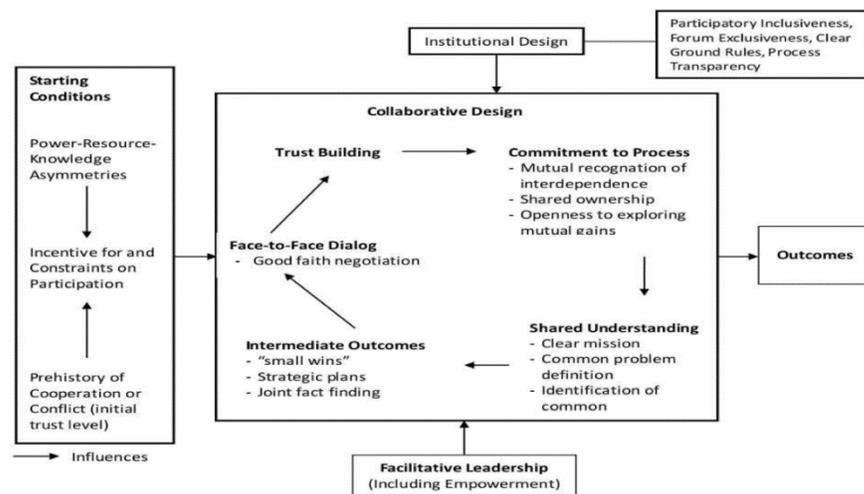
1.6.1.3 Definisi Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan sebuah konsep kolaborasi yang menggambarkan proses dari lembaga public melakukan suatu pengaturan dalam proses pembuatan atau perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan publik (Astuti, 2020). Collaborative Governance juga dapat diartikan sebagai hubungan kerja sama yang terjadi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak ke dua sebagai pelaksana suatu kebijakan (Gunawan & Ma`ruf Farid, 2020). Dalam proses pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah peran pemangku kepentingan atau stakeholder yaitu pemerintah, pihak swasta, ataupun masyarakat sangat penting dan harus dicermati dengan baik karena dalam pelaksanaan suatu kebijakan mempunyai implikasi yang luas dan cara penyelesaiannya akan menjadi tidak optimal jika dilakukan oleh satu pihak saja (Umabahi et al., 2022). Collaborative Governance menurut (Afiya Sasti Ihtiarni, 2008) dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang mana melibatkan aktor-aktor dalam berbagai level yang mana orientasinya mengarah kepada consensus dan musyawarah yang mana pada akhirnya mempunyai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan public atau pengelolaan program atau aset public. (Tinggi et al., 2022) mendefinisikan Collaborative Governance sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang

melibatkan orang-orang melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau ruang publik, swasta, dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain.

Menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) menjabarkan definisi Collaborative Governance merupakan suatu bentuk susunan pemerintahan dimana satu atau lebih instansi public berhubungan secara langsung dengan stakeholder non-negara dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi pada consensus, deliberatif dan menuju implementasi dari kebijakan publikk, atau dalam manajemen program atau asset publik. Selain itu Ansell & Gash juga menjabarkan model Collaborative Governance yang terdiri dari beberapa tahap yaitu:

Gambar 1. 2 Model Collaboration Government



Sumber: Model of Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008)

1. Starting Condition (Kondisi Awal)

Dalam tahap ini dimaksudkan relasi antar stakeholder yang mana masing-masing actor mempunyai latar belakang yang berbeda dan dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan yang asimetris dalam relasi yang dijalankan.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif yang terdiri dari:

- a. Manajemen yang cukup atas proses kolaborasi
- b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis
- c. Memastikan bahwa suatu proses kolaborasi dapat diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan menyakinkan bagi semua actor yang terlibat.

3. Desain Intitusional (Institusional Design)

Desain Institusional mengacu pada kerjasam dasar atau aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis dan yang paling ditekankan yaitu legitimasi kerjasama dalam proses kolaborasi yang pada dalam proses kolaborasi ini pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.

4. Proses Kolaborasi (Collaborative Process)

Proses Kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan yang mempunyai tiga tahapan antara lain problem setting (penentuan permasalahan), direction setting (penentuan tujuan), dan

implementasi. Tahapan untuk membentuk kolaboratif terdiri dari lima hal berikut:

- a. Dialog tatap muka (Face to Face), yang secara langsung melibatkan setiap stakeholder, karena collaborative governance ini ditinjau dari proses yang mana dialog harus dilakukan dengan bertatap muka yang bertujuan untuk mencari peluang kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak. Dialog secara langsung penting dilakukan untuk mengurangi antagonism dan sikap tidak menghargai yang berkemungkinan besar akan muncul pada stakeholder yang terlibat
- b. Membangun kepercayaan (Trust Building), setiap pelaksanaan Collaborative governance pastinya akan muncul rasa tidak percaya antar stakeholder yang mana trust building harus dilakukan secepat mungkin sejak proses kolaborasi pertama dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara tidak saling mengedepankan kepentingan pribadi ataupun kelompok.
- c. Komitmen terhadap proses (Commitment to Process), setiap stakeholder harus mempunyai komitmen yang kuat untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang akan terjadi pada proses kolaborasi.
- d. Share Understanding, dalam hal ini para stakeholder harus saling berbagi pemahaman tentang hal apa yang akan mereka capai dari proses kolaborasi yang dilakukan. Hal tersebut dapat diimplementasikan

melalui saling berbagi pemahaman mengenai visi dan misi bersama, tujuan bersama, kepentingan dan ideologi yang sama.

- e. Intermediate Outcomes, dalam proses Collaborative Governance akan terlaksana pada saat tujuan dan keuntungan dari kolaborasi tersebut bersifat nyata. Oleh karena itu harus dirancang dengan teliti terkait tujuan dan keuntungan dilaksanakannya Collaborative Governance (Lestari & Farahnisa, 2020).

1.6.2 Teori Pentahelix

Konsep Pentahelix terdiri dari kata “penta” yang berarti lima dan “helix” yang artinya jalinan (Firdaus & Cahyani, 2023). Lima komponen yang mana berperan dan bersama-sama bersinergi dalam mengembangkan potensi yang ada di suatu daerah sebagai upaya percepatan pengembangan ekonomi terdiri dari pemerintah yang mempunyai peran untuk koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan suatu hal. Swasta/bisnis/industry mempunyai peran melakukan proses bisnis yang akan menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pembangunan yang berkelanjutan yang mana swasta ini berperan sebagai promotor dalam hal pengembangan usaha. Akademisi berperan sebagai sumber pengetahuan yang merancang konsep, teori terbaru yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan usaha. Media berperan sebagai pihak yang menunjang publikasi dan promosi serta membangun brand image dengan memanfaatkan teknologi yang canggih melalui informasi yang tersebar secara cepat dengan berbagai metode penyebaran berita. Komunitas terdiri dari sekumpulan orang yang mempunyai minat yang sama untuk

pengembangan suatu daerah untuk melakukan suatu usaha (Suari, 2022). (Maturbongs, 2020), *Pethahelix* adalah kerjasama, interaksi, kompromi oleh beberapa pihak yang terkait baik itu antar kerja, antar organisasi atau antainstitusi maupun kerjasama kelompok yang juga menerima manfaat dari adanya strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik penerimaan manfaat secara langsung maupun tidak langsung tentunya dalam hal ini semua pihak memiliki tujuan yang sama terkait apa yang mereka ingin capai dalam kolaborasi atauun kerjasama yang dilakukan.

Gambar 1. 3 Model Kolaborasi Pentahelix



Sumber: Model Kolaborasi Pentahelix (Maturbongs, 2020)

Indikator Kolaborasi Pentahelix:

1. Pemerintah

Organisasi pemerintah yaitu birokrasi, sebagai dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan.

Salah satu komponen backward mapping yang mendukung implementasi adalah struktur pelaksana

2. Akademisi

Akademisi sebagai aktor yang sering terlibat dalam kebijakan, memiliki kepakaran dan merupakan lembaga penelitian yang berperan dalam implementasi kebijakan. Dalam pembangunan UMKM, akademisi dalam hal ini perguruan tinggi dan lembaga penelitian memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat berbasis pengetahuan

3. Pelaku Usaha

Dalam hal ini, pelaku usaha mempunyai peran yang cukup penting, di mana pelaku usaha ini terlibat dalam kemitraan dengan pemerintah untuk pengembangan teknologi dan inovasi

4. Masyarakat

Komunitas dapat berperan sebagai agen penyampaian informasi tentang inovasi dan proyek pengembangan kepada masyarakat luas dan sebagai pihak yang memberikan dukungan serta promosi untuk produk atau layanan inovatif dari anggota komunitas

5. Media

Media massa dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, terus mengalami perkembangan yang pesat. Awalnya, kita hanya mengenal bahwa media massa terbagi antara media cetak seperti surat kabar, majalah dan media cetak lainnya, serta media elektronik berupa siaran televisi dan

radio. Sedangkan dimasa kini, seiring dengan berkembangnya teknologi dan internet, maka muncullah new media atau media baru yaitu media sosial seperti; facebook, instagram, twitter, youtube dan lainnya. Medium yang mampumenggabungkan/mengintegrasikan/mengkonvergensi keseluruhan karakteristik media dari bentuk-bentuk terdahulu, dengan tetap berfokus pada proses komunikasi.

Kemunculan media baru yang terus berkembang berguna bagi interaksi sosial antara manusia yang bersifat digital, berjaringan dan terkomputerisasi sebagai efek dari kecanggihan teknologi, informasi dan komunikasi. Saat ini, dengan kemudahan mengakses media sosial oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, maka masyarakat mulai meninggalkan metode promosi yang bersifat konvensional seperti melalui media cetak dan elektronik, dan beralih pada penggunaan media sosial yang dinilai efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya akun-akun baik yang dikelola resmi oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas, maupun milik pribadi dengan menampilkan dan merekomendasikan daerah tujuan wisata untuk dikunjungi (Maturbongs, 2020).

1.6.3 UMKM

Kedudukan UMKM di Indonesia sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai Usaha produktif milik orang perorang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling

banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Setiawati, 2017).

Tujuan dari UMKM menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan dari tujuan dari UMKM yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan (Ruyatnasih, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, menghasilkan penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar, milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri dan bukan merupakan anak cabang dari perusahaan lain, berbentuk badan usaha perorangan yaitu badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum termasuk koperasi (Mikro et al., 2019). Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan

usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp.200.000.000 sd Rp.500.000.000) dan non manufaktur (Rp. 200.000.000 sd Rp. 600.000.000) (Hidayat et al., 2022).

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual dari penelitian ini menggambarkan secara jelas terkait permasalahan yang akan diteliti. Konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Collaborative Governance

Collaborative Governance dapat diartikan sebagai proses pengambilan suatu keputusan yang dilakukan dengan beberapa pihak terlibat dengan tujuan untuk mencapai suatu kebijakan. Collaborative Governance penting dalam pengambilan suatu keputusan karena setiap Lembaga mempunyai peran untuk bekerja sama berdasarkan pembagian peran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas masing-masing yang mana nantinya akan menghasilkan prosedur hukum, aturan dan kebijakan yang tepat (Sani & Annisa, 2019).

2. Pentahelix

Kolaborasi Pentahelix merupakan sebuah kolaborasi yang melibatkan lintas sector yang terdiri dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas dan media massa dalam bentuk kerja samanya, yang mana dari lima unsur tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu inovasi yang didukung dengan adanya sumber daya dan potensi yang sudah tersedia dalam suatu daerah (Dani Rahu & Suprayitno, 2021).

3. UMKM

UMKM merupakan sebuah usaha yang ditujukan untuk membuka peluang usaha dan membantu pemberdayaan dalam masyarakat serta berguna untuk meningkatkan pendapatan perkapita maupun meningkatkan perekonomian suatu daerah, sehingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dituntut mampu untuk ikut serta dalam mengembangkan perekonomian negaranya terutama dalam melakukan pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi (Halim, 2020).

1.8 Definisi Operasional

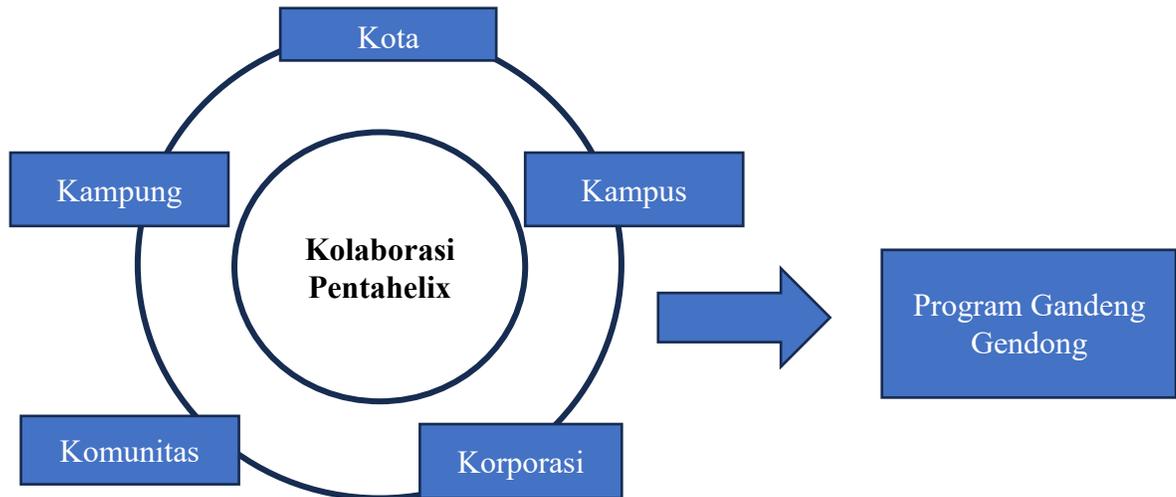
Dalam penelitian ini, definisi operasional digunakan untuk menjelaskan variable atau konsep yang diamati dalam sebuah penelitian dengan cara menguraikan variable agar penulis memberikan batasan-batasan dengan tujuan menjawab masalah dalam penelitian.

Tabel 1.4 Definisi operasional

Variable	Indikator	Parameter
Pentahelix	Pemerintah	Bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan
	Akademisi	Lembaga penelitian dalam implementasi kebijakan
	Pelaku Usaha	Pihak yang Bertanggungjawab Dalam Bagian Pendanaan dan Inovasi
	Masyarakat	Pihak Penghasil Produk, Promosi Produk atau Layanan Inovatif Dari Anggota Komunitas
	Media	Bahan inetraksi sosial antara manusia yang bersifat digital

1.9 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 4 Kerangka Berpikir Kolaborasi Pentahelix



Dalam kolaborasi Pentahelix 5 aktor dari Program Gandeng Gendong terdiri dari berbagai macam stakeholder yang terdiri dari:

No	Aktor	Stakeholder
1	Kota (Pemerintah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda Kota Yogyakarta 2. Dinas UMKM Kota Yogyakarta 3. Dinas Kominfo Kota Yogyakarta
2	Kampus (Akademisi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMY 2. UGM 3. UAD
3	Korporasi (Pelaku Usaha)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Pos Indonesia 2. PT Sosro

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Tokopedia 4. PT Kereta Api Indonesia 5. Galeria Mall 6. Malioboro Mall
4	Komunitas (Media)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Home Business Camp (HBC) 2. Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Yogyakarta 3. Karang Mitra Usaha 4. Forum Komunikasi UMKM 5. Forum Komunikasi IKM 6. Paguyuban Batik Sidoluhur
5	Kampung	Kemantren Jetis

1.10 Metode Penelitian

1. Penelitian tentang Program Gandeng Gendong ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan studi kasus yang didalamnya menjelaskan tentang penjelasan secara detail, penjelasan tentang proses kolaborasi yang terjadi pada program Gandeng Gendong dan menjelaskan tentang apa saja factor keberhasilan yang berpengaruh pada program Gandeng Gendong (Iza & Nurhaeni, 2021). Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif yang menggambarkan

mengenai masalah yang diteliti. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didapat dari Bappeda Kota Yogyakarta melalui wawancara dan dokumentasi. Peran dari penelitian kualitatif untuk peneliti adalah sebagai instrument dalam mengumpulkan data dan menafsirkan data melalui pengamatan secara langsung, wawancara dan dokumentasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan ditempat yang telah dipilih oleh penulis untuk menyelesaikan penelitiannya yang dilakukan di Bappeda Kota Yogyakarta. Penelitian tentang Program Gandeng Gendong ini penting dilakukan di Kota Yogyakarta karena Kota Yogyakarta merupakan kota yang mencetuskan adanya program ini dengan melihat segala potensi yang ada di Kota Yogyakarta. Selanjutnya karena Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan perkembangan kota. Melalui penelitian, kita dapat memahami efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Hal yang tak kalah penting sebagai bentuk penguatan penelitian ini adalah karena Kota Yogyakarta mendapat penghargaan dalam acara Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2020 dengan menempati juara dua sebagai Kota Terbaik tingkat nasional. Selain itu, Program Gandeng Gendong juga masuk dalam 99 besar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan-RB tahun 2020.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data diperoleh melalui penelitian yang dilakukan secara langsung atau survey. Data primer dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik dan disesuaikan dengan tujuan penelitian tertentu. Data penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang dilakukan di Bappeda Kota Yogyakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh orang atau entitas lain sebelumnya, dan data ini digunakan kembali atau dianalisis ulang oleh peneliti untuk tujuan tertentu. Data sekunder tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, tetapi diambil dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti publikasi ilmiah, laporan pemerintah, basis data, literatur, dan sumber lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal mengenai kolaborasi Pentahelix dalam program Gandeng Gendong pada UMKM di Kota Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode untuk mengumpulkan sumber daya yang akan dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui:

1) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang bertukar informasi melalui tanya jawab yang dilakukan untuk menemukan suatu permasalahan yang akan diteliti juga dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Mar'atusholihah et al., 2019). Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai narasumber untuk mengetahui informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Wawancara berkaitan dengan pesan verbal dan nonverbal dan tambahan yang ditemui oleh peneliti. Dalam penelitian, wawancara merupakan hal yang penting, karena wawancara juga dapat membantu dalam membangun hubungan interpersonal antara peneliti dan partisipan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan partisipan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan terperinci. Berikut merupakan daftar responden dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 1.5 Daftar Narasumber Wawancara

No	Nama	Instansi/Jabatan
1	Bintang Prasojo	Bidang Riset Inovasi dan Pengendalian Bappeda Kota Yogyakarta

2	Gregorios Andri Krisna Murti	Bidang Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo
3	Luluk Muryani	Kepala Jawatan Kemantren Jetis
4	Hibnu Basuki	Bidang Data Informasi dan Penguatan Manajemen Usaha Mikro Kecil
5	Dyah Mutiarin	Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6	Bayu Agustina	Forum Komunikasi UMKM
7	Ita Wardhani	Korporasi PT Pos Indonesia

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data terhadap focus masalah yang diteliti baik berupa dokumen, catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto atau dokumen lainnya (Sugiyono, 2016). Dokumentasi memainkan peran penting dalam kepatuhan standar etika penelitian. Dokumentasi etika penelitian, izin partisipan, dan protokol keamanan membantu melindungi hak dan kesejahteraan partisipan serta menjaga integritas penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan untuk mengekstrak makna, pola, dan informasi yang dapat membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Teknik analisis data adalah langkah kritis dalam proses penelitian yang memungkinkan peneliti menggali makna dari data, membuat kesimpulan yang informasional, dan memberikan kontribusi pada pengetahuan ilmiah yang dilakukan setelah data terkumpul dari lapangan (Sutisna, 2020).

a. Analisis data

Analisis data dilakukan sebagai upaya mencari dan menata catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya sebagai bentuk pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti (Rijali, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari Bappeda Kota Yogyakarta melalui wawancara dengan mengumpulkan data-data sebagai acuan untuk menentukan focus terhadap data penelitian berikutnya. Selain itu, peneliti juga memperoleh data melalui jurnal-jurnal dari penelitian terdahulu ataupun dari website pemerintah Kota Yogyakarta sebagai data penguat penelitian.

b. Penyajian data

Dalam penyajian data menjelaskan hubungan data dan digambarkan dengan keadaan yang terjadi. Hal tersebut tentunya akan memudahkan peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan yang benar yang akan

ditampilkan dalam bentuk teks narasi (Ahmad & Muslimah, 2021). Penyajian data penting dilakukan karena akan membantu dalam memvalidasi temuan penelitian. Dengan menyajikan data secara transparan, peneliti memberikan kesempatan kepada orang lain untuk meninjau, memeriksa, dan mencoba mereplikasi hasil penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan temuan pokok dari penelitian yang menunjukkan makna dari temua-temuan yang ditulis secara singkat, padat dan jelas serta diuraikan dengan paragraph berdasarkan pada penelitian yang telah dirumuskan (barnawi dkk, 2010). Kesimpulan termasuk elemen penting dalam laporan penelitian karena membantu mengemukakan esensi penelitian dan memberikan pandangan yang lebih besar terhadap makna temuan dalam konteks yang lebih luas.